



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP di Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 105);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2009 Tentang penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat;
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;
8. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat tahun 2016
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 A Tahun 2017 tentang pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati di bidang Perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.